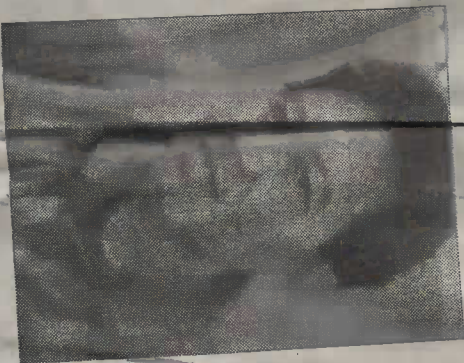


Roder Smedley, 14-5-2019

Beberapa perusahaan dalam melakukan ekspedisi barang-barangnya menggunakan truk yang bertonase besar sehingga dapat mengangkut barang dalam jumlah besar walaupun.



Akadun

pen hal itu berbubrukan dengan aturan batas tonase yang ada. Para sopir tersebut tentu di belakangnya para pengusaha lebih baik membayar denda daripada menuruti aturan tonase yang ada.

Bisa diprediksi dari perilaku para sopir (pengusaha) tersebut, jalan yang mulus dalam waktu satu atau dua bulan sudah han-

cur kembali. Para pengguna jalan yang lain hanya bisa mengelus dada karena hanya sebentar menikmati jalan yang mulus. Padahal mereka membayar pajak kendaraan selama 1 (satu) tahun.

hum. Apakah parasopir (pengusaha) dapat disalahkan dan menjadi terdakwa tunggal atas sebab rusaknya jalan raya? Tentu saja, para sopir (pengusaha) tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya atas kondisi rusaknya jalan.

atas kondisi tersebut, pihak yang bertanggung jawab atas cepat rusaknya jalan tersebut adalah pemerintah. Hal ini disebabkan pemerintah tidak antisipatif terhadap kebutuhan para pengusaha akan peningkatan daya saing dengan melakukan efisiensi angkutan barang serta, kurang mampu melakukan penegakan hukum.

hukun.
Selayaknya pemerintah sudah membangun jalan raya dan jembatan yang mampu dilalui oleh kendaraan yang bertonase 100 ton pada awal tahun 1990-an.

Bahkan seharusnya awal tahun 2000-an pemerintah sudah dapat membangun jalan raya yang dapat dilewati oleh kendaraan yang bertonnase di atas 100 ton. Realitanya sekarang ini pemerintah masih berjalan di tempat dalam pengadaan infrastruktur jalan, sebagian besar ruas jalan di Indonesia hanya dapat dilalui oleh kendaraan yang 60 ton ke bawah.

Kedua, kualitas jalan yang rendah tidak sesuai anggaran yang dikeluarkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembanguan di Indonesia termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan hanya menghabiskan 60-70% dari dana yang sudah dianggarkan. Tiga puluh sampai empat puluh persen lagi sampai dan melayang ke mana-mana dan di mana-mana. Oleh karena itu produk jalan raya atau jembatan tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan. Dapat diprediksi produk jalan dan jembatan kurang memiliki akuntabilitas. (*)